

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja-SKPD merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Renstra-SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

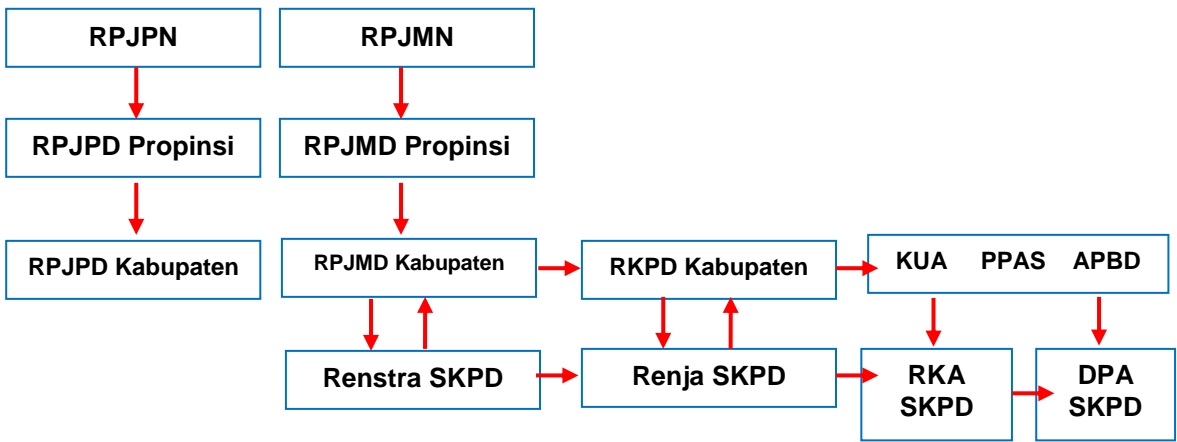
Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok ini dilakukan melalui musyawarah untuk menghimpun usulan dan masukan dari setiap bidang yang ada. Masukan dari bidang-bidang akan disesuaikan kembali dengan dokumen perencanaan lain yang sudah ada. Disamping itu menyusun rencana kerja ini juga dilakukan dengan memperhatikan isu-isu dan kegiatan-kegiatan di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang sedang berkembang di masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011-2016, terutama berkaitan dengan Misi ketiga yaitu *“Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai”* dan untuk kebudayaan termasuk kedalam misi keempat yaitu *“Membangun Karakter Masyarakat sesuai filosofi ‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, didukung oleh*

Pemerintahan Nagari (Nagari Adat) Kuat dengan Meningkatkan Peran Tungku Tigo Sajaringan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai) dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Lainnya” . Selain itu juga mempedomani Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Solok Tahun 2013-2025. Dokumen Renja ini diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Disamping itu juga mensinkronkan dengan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat serta Program dan Rencana Kegiatan Kementerian Pariwisata RI.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lain disajikan sebagaimana diagram berikut:

Gambar 1.1.
Hubungan Dokumen Rencana Kerja SKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
9. Undang-undang Nomor 23 Tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 ;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Solok Tahun 2013-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan program kerja kepariwisataan dan kebudayaan untuk mendukung program kerja kepala daerah selama 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 adalah:

1. Tersedianya acuan pelaksanaan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
2. Sebagai pedoman untuk menentukan skala prioritas pembangunan sektor kepariwisataan dan kebudayaan tahun 2018.
3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan dan kebudayaan tahun 2018.
4. Sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan dan kebudayaan tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal SKPD dan Penetapan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN, FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan 11 program dan 17 kegiatan yang terkait dengan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan dengan 6 sasaran dan dijabarkan dalam 26 indikator kinerja.

Adapun capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tertib Administrasi dan Tata Pemerintahan

Pencapaian sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan pada Tahun 2016 dilaksanakan melalui 5 indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Indikator sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan pada Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
2.	Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	%	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku	Laporan	5	5	100	5	5	100
4.	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM	Orang	2	2	100	2	2	100

Untuk Tahun 2015 dan 2016 pencapaian untuk sasaran tertib administrasi dan tata pemerintahan tercapai 100% melalui 5 indikator sasaran

2. Terwujudnya eksistensi kesenian dan budaya nagari untuk meningkatkan tradisi dalam pewarisan nilai-nilai adat budaya daerah

Pencapaian sasaran terwujudnya eksistensi kesenian dan budaya nagari untuk meningkatkan tradisi dalam pewarisan nilai-nilai adat budaya daerah pada Tahun 2016 dilaksanakan melalui 11 indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Indikator sasaran terwujudnya eksistensi kesenian dan budaya nagari untuk meningkatkan tradisi dalam pewarisan nilai-nilai adat budaya daerah pada Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina	Kelompok	10	10	100	10	10	100
2.	Persentase meningkatnya sadar wisata masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah pelatihan masyarakat sadar wisata	Kali	1	1	100	1	1	100
4.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	2	2	100	2	2	100
5.	Jumlah situs budaya dan bersejarah (Benda Cagar Budaya) yang diregistrasi	BCB	3	3	100	3	3	100
6.	Jumlah goup kesenian yang dibina	Group	28	28	100	28	28	100
7.	Jumlah pelaksanaan forum dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya tingkat Kab. Solok	Kali	1	1	100	1	1	100
8.	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan adat yang representatif	Paket	10	10	100	10	10	100
9.	Jumlah regulasi pengembalian nama/symbol nagari ke aslinya	Ranperda /Perda	1	1	100	1	1	100
10.	Jumlah nagari yang mempunyai dokumen sejarah nagari	Nagari	11	11	100	11	11	100
11.	Jumlah nagari yang terbina kelembagaan adatnya	Nagari	74	74	100	74	74	100

Khusus untuk indikator jumlah regulasi pengembalian nama/symbol nagari ke aslinya pada Tahun 2016 ditargetkan menjadi perda namun belum terealisasi karena permasalahan belum ada dilakukan sosialisasi ke nagari-nagari sehingga belum bisa ditetapkan menjadi perda oleh DPRD Kabupaten Solok.

Meningkatnya efektifitas promosi dan kerjasama kepariwisataan melalui sapta pesona, fasilitas objek wisata yang memadai, pelestarian kebudayaan dan penataan taman

Pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas promosi dan kerjasama kepariwisataan melalui sapta pesona, fasilitas objek wisata yang memadai, pelestarian kebudayaan dan penataan taman pada Tahun 2016 dilaksanakan melalui 4 indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Indikator sasaran meningkatnya efektifitas promosi dan kerjasama kepariwisataan melalui sapta pesona, fasilitas objek wisata yang memadai, pelestarian kebudayaan dan penataan taman pada Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase fasilitasi Tour de Singkarak	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Persentase	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah terlaksananya even promosi dan pemasaran pariwisata	Even	2	2	100	2	2	100
4.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	414.840	321.661	77	414.840	321.661	77
	a. Mancanegara	Orang	376		93			93
	b. Nusantara	Orang	414.643	350	77	376	350	77
				321.311		414.643	321.311	

Khusus untuk indikator jumlah kunjungan wisatawan tidak tercapai sesuai dengan target yang direalisasikan karena pendataan yang dilakukan ke objek-objek wisata belum optimal dilakukan sehingga tidak semua objek wisata terdapat data wisatawan yang mengunjungi objek tsb.

3. Meningkatnya daya dukung masyarakat terutama generasi muda untuk sadar wisata dalam mewujudkan Kabupaten Solok sebagai salah satu destinasi wisata Sumatera Barat

Pencapaian sasaran meningkatnya daya dukung masyarakat terutama generasi muda untuk sadar wisata dalam mewujudkan Kabupaten Solok sebagai salah satu destinasi wisata Sumatera Barat pada Tahun 2016 dilaksanakan melalui 2 indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Indikator sasaran meningkatnya daya dukung masyarakat terutama generasi muda untuk sadar wisata dalam mewujudkan Kabupaten Solok sebagai salah satu destinasi wisata Sumatera Barat pada Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha wisata dan industri pariwisata	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha wisata dan industri pariwisata	Biro	5	5	100	5	5	100

4. Meningkatnya kualitas penataan objek wisata di kawasan unggulan Kabupaten Solok

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penataan objek wisata di kawasan unggulan Kabupaten Solok pada Tahun 2016 dilaksanakan melalui 2 indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Indikator sasaran meningkatnya kualitas penataan objek wisata di kawasan unggulan Kabupaten Solok pada Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata Kabupaten Solok	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase meningkatnya kontribusi sektor wisata terhadap PDRB	Persentase	0,76	0,76	100	0,76	0,76	100

5. Meningkatnya lokasi ruang terbuka hijau yang terpelihara

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penataan objek wisata di kawasan unggulan Kabupaten Solok pada Tahun 2016 dilaksanakan melalui 2 indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Indikator sasaran meningkatnya kualitas penataan objek wisata di kawasan unggulan Kabupaten Solok pada Tahun 2016

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2015		Capaian Tahun 2015 (%)	Tahun 2016		Capaian Tahun 2016 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata Kabupaten Solok	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase meningkatnya kontribusi sektor wisata terhadap PDRB	Persentase	0,76	0,76	100	0,76	0,76	100

Berikut rekapitulasi dari seluruh sasaran dan indikator kinerja tertuang dalam dalam tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD :

Tabel 2.7.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2021)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (2016)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n- 2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN (2016)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA SKPD TAHUN (2016)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN (2016)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (2016)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/6)
					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
					NON URUSAN									
1	17	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	17%
1	17	1	01	25	Pelayanan administrasi perkantoran									
1	17	1	02		Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	17%
1	17	1	02	45	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur									
1	17	1	02	47	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur									
1	17	1	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM	10 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100	2 orang	100%	17%
1	17	1	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan									
1	17	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	100%	17%
1	17	1	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar									

					URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN								
1	17	1	15		Program Pengembangan Nilai Budaya								
1	17	1	15	07	Penguatan kelembagaan adat nagari	Memperkuat kelembagaan LKAAM & KAN sebagai pendukung utama nagari adat	2 lembaga adat	2 lembaga adat	2 lembaga adat	2 lembaga adat	100	2 lembaga adat	100% 17%
						Jumlah nagari yang terbina kelembagaan adatnya	74 nagari	74 nagari	74 nagari	74 nagari	100	74 nagari	100% 17%
						Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan adat yang representatif	60 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100	10 paket	100% 17%
						Regulasi pengembalian nama dan simbol-simbol nagari sesuai dengan bentuk/bahasa aslinya	1 perda	1 ranperda	1 ranperda	1 ranperda	100	1 ranperda	100% 50%
						Jumlah pelaksanaan forum dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya minang kabau tingkat kabupaten solok	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	100% 17%
1	17	1	16	05	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya								
1	17	1	16	01	- Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2 festival/11 event	2 festival/11 event	2 festival/11 event	2 festival/11 event	100	2 festival/11 event	100% 17%
1	17	1	16	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah situs dan BCB yang diregistrasi	30 BCB	5 BCB	5 BCB	5 BCB	100	5 BCB	100% 17%
						Pemeliharaan BCB	54 BCB	9 BCB	9 BCB	9 BCB	100	9 BCB	100% 17%
						Plang Merk BCB	24 BCB	4 BCB	4 BCB	4 BCB	100	4 BCB	100% 17%
						Papan Informasi BCB	24 BCB	4 BCB	4 BCB	4 BCB	100	4 BCB	100% 17%
1	17	1	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya								
1	17	1	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah group kesenian yang dibina	156 group kesenian	26 group kesenian	26 group kesenian	26 group kesenian	100	26 group kesenian	100% 17%
						Pelatihan kesenian anak nagari	252 orang	42 orang	42 orang	42 orang	100	42 orang	100% 17%
						Bantuan alat kesenian daerah	54 paket	9 paket	9 paket	9 paket	100	9 paket	100% 17%
						Pembinaan kesenian tradisional	6 nagari	1 nagari	1 nagari	1 nagari	100	1 nagari	100% 17%
						Festival seni anak nagari	1 event	1 event	1 event	1 event	100	1 event	100% 17%

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan Pariwisata.

Pada revisi rencana strategis Dinas Pertanian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok

Tahun 2011-2015, terdapat su-isu strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok yaitu :

1. Percepatan pembenahan destinasi wisata unggulan yang berada dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kabupaten Solok khususnya untuk 3 (tiga) KSPD yaitu Kawasan Danau Singkarak dan sekitarnya, Kawasan Taman Hutan Kota Terpadu dan sekitarnya dan Kawasan Danau Kembar dan sekitarnya;
2. Pelaksanaan festival/even yang bersifat nasional (tepat sasaran dan berkelanjutan) dan masuk kedalam kalender wisata secara nasional;
3. Promosi dan pemasaran pariwisata yang diselaraskan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini;
4. Pelestarian budaya dan adat istiadat lokal Kabupaten Solok, termasuk didalamnya kesenian anak nagari, kuliner, kebiasaan sehari-hari, dll;
5. Pengembangan program kemitraan dengan seluruh lembaga dan stake holder terkait seperti kelompok sadar wisata, usaha jasa pariwisata, ASITA, PHRI, penggiat wisata dll.

Rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 menargetkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan melalui strategi dan program-program pembangunan pariwisata dan kebudayaan. Adapun kondisi yang diharapkan adalah:

1. Terlaksanya pelestarian kesenian dan aktualisasi adat budaya daerah.
2. Terlaksananya penguatan kelembagaan adat, Perda nama Nagari ke bahasa aslinya dan buku sejarah Nagari.
3. Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah, festival dan Pekan Budaya Sumatera Barat.
4. Jumlah pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB).
5. Jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
6. Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Uda dan Uni Kabupaten Solok.
7. Jumlah promosi pariwisata dalam dan luar negeri

8. Terlaksananya fasilitasi Tour de Singkarak
9. Jumlah pagelaran seni dan budaya di Kabupaten Solok
10. Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 15 %.
11. Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan Mancanegara sebesar 10 %.
12. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana unggulan pariwisata di Kabupaten Solok.
13. Persentase pembangunan sarana dan prasarana Objek Wisata yang ada di Kabupaten Solok, yang fokus terhadap tiga kawasan yaitu danau Singkarak, THKT, dan Kawasan Danau Kembar tiga.
14. Persentase terlaksananya kegiatan wisata minat khusus.
15. Persentase kerjasama dan koodinasi dengan pelaku usaha wisata, usaha pertanian dan industri pariwisata.
16. Peningkatan jumlah kelompok sadar wisata.

Gambaran rinci kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang telah dilaksanakan selama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Solok

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2012 (Tahun n-2)	TAHUN 2013 (Tahun n-1)	TAHUN 2014 (Tahun n)	TAHUN 2015 (Tahun n+1)	TAHUN 2012 (Tahun n-2)	TAHUN 2013 (Tahun n-1)	TAHUN 2014 (Tahun n)	TAHUN 2015 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah SKPD yang sudah menyusun SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	1	0	0	0	1	0	0	0	SPM Bidang Kesenian, sesuai PERMEN PM.106/HK.501 /MKP/2010
		Jumlah SKPD yang sudah menyusun SOP	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	8	12	0	0	8	12	0	0	SOP sesuai PERMENDAG RI Nomor 41 Tahun 2010

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sektor pariwisata dan kebudayaan memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional umumnya dan Kabupaten Solok khususnya. Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata dan kebudayaan merupakan sektor prioritas yang berkaitan dengan sektor lainnya dan mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang pariwisata dan kebudayaan, dengan berbagai potensi yang dimiliki diantaranya adalah keindahan alam dan keanekaragaman budaya lokal yang sangat khas.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, perlu dilakukan analisa terhadap kondisi objektif pariwisata dan kebudayaan. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumber daya alam, prasarana dan sarana produksi, sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi yaitu :

1. Belum optimalnya daya saing pariwisata daerah, dimana kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih rendah yaitu hanya sebesar 0,7%;
2. Masih terbatasnya fasilitas penunjang destinasi pariwisata daerah;
3. Masih belum berkembangnya industri pariwisata daerah;
4. Masih belum memadainya sarana dan prasarana di destinasi pariwisata daerah;
5. Masih kurangnya minat generasi muda dalam pelestarian kekayaan adat budaya Minang Kabau.

Tantangan Pelayanan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok berdasarkan analisa Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, analisa RPJMD Kabupaten Solok, analisa RTRW, dan analisa KLHS adalah sebagai berikut :

1. Budaya daerah seperti adat yang diadatkan, keramaian nagari, tari tradisional belum menjadi bagian paket wisata.
2. Sistem adat minang menjadi penghambat minat investasi terutama dalam perubahan hak atas tanah.
3. Masyarakat sekitar obyek kawasan belum menjadi bagian dari industri pariwisata.
4. Atraksi wisata belum dapat ditampilkan pada kawasan pariwisata secara periodik, seperti: pertunjukan hiburan, paralayang.
5. Souvenir atau industri UKM belum menjadi bagian industri pariwisata daerah
6. Kegiatan usaha jasa pariwisata belum berkembang, dimana minat investasi masih sangat terbatas.
7. Sarana dan Prasarana destinasi kurang memadai dan banyak yang tidak berfungsi, seperti Obyek Wisata Danau Datas, Danau Dibawah.
8. Masih banyak obyek wisata dikelola oleh ndan masyarakat
9. Tidak ada kejelasan status lahan dan pengelolaan obyek wisata antara Pemkab dengan Nagari
10. Pembuatan perna tentang pemungutan retribusi masuk ke objek wisata
11. Tarif parkir Parkir menggunakan Retribusi parkir di tepi jalan umum
12. Kebersihan pada kawasan obyek wisata yang kurang terjaga
13. Tidak ada jaringan pemasaran seperti kerjasama dengan ASITA, PHRI dll.
14. Pemasaran belum melibatkan masyarakat, seolah-olah hanya tugas pemerintah
15. Promosi wisata masih sangat terbatas.

Sedangkan peluang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Memiliki 74 Nagari dimana peraturan setempat (adat yang diadatkan) seperti: upacara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan dapat berbeda satu sama lain setiap nagari.
2. Aksesibilitas mudah : berdekatan dengan Pelud. Minangkabau-Padang sebagai pintu masuk utama pariwisata Indonesia, dilalui

- oleh jalan arteri primer (nasional) maupun jalan kolektor primer (provinsi), dan terlewati angkutan kereta api wisata Padang Panjang-Sawah Lunto.
3. Tersedia 7 buah penginapan/hotel/villa yang tersebar di lokasi obyek wisata, kota kecamatan, dan jalur jalan arteri primer.
 4. Terdapat 104 rumah makan tersebar di sembilan kecamatan
 5. Dukungan pendidikan: SMK Pariwisata Lembah Gumanti (jasa usaha wisata), dan SMK I Lembah Gumanti (akomodasi perhotelan, tata boga)
 6. 14 Kecamatan terdiri dari 189 obyek wisata (terdapat 109 objek wisata alam, dan 80 wisata budaya dan wisata sejarah)
 7. Obyek wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar masuk kawasan strategis provinsi.
 8. Terdapat berbagai jenis panorama alam : Rest Area Bateh, Katapiang Indah, Panorama Angin Berembus, Panorama Gunung Tampa Dado, Panorama Danau Kembar.
 9. Budaya: Rumah Gadang 20 ruang, Balairung Sari, Nagari Tradisional, Convention Hall, Mesjid Tuo Kayu Jao.
 10. Raga: GOR Batu Tupang
 11. Sejarah: Makam Dt.Parpatiah Nan Sabatang, Makam Syekh Supayang.
 12. Agro: Perkebunan Teh PTPN VI, Simpang Tanjung Nan Ampek.
 13. Pendidikan: Pabrik Teh PTPN VI.
 14. Kesehatan: Aia Angek Bukik Kili, Aia Angek Bukik Gadang
 15. Olah Penyelenggaraan event : Tour de Singkarak, Pekan Budaya Sumbar yang rutin dilaksanakan setiap tahun
 16. Pembuatan sarana dan bahan promosi pariwisata yang rutin dilaksanakan

2.4. Isu-isu Penting Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan

secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berpengaruh dalam pelaksanaan pelayanan, maka muncul isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi yang terjadi serta memiliki dampak bagi keberlanjutan pembangunan pariwisata dan kebudayaan dan perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya lokal dan kawasan pertumbuhan ekonomi;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha;
3. Peningkatan kualitas implementasi kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius sesuai ABS-SBK.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas

hususnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2018, Program Kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan dengan pencapaian target RPJMD dan ketersediaan anggaran. Adapun rincian terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dengan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Kabupaten Solok

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata											
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA										
1	NON URUSAN				602,203,586	NON URUSAN				602,203,586	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	270,000,000	- Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	270,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur		Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	100%	299,203,586	- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur		Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai	100%	299,203,586	
	- Mobeuler					- Mobeuler					
	- Website Dibudpar		Tersosialisasikannya pembangunan bidang kepariwisataan Kabupaten Solok			- Website Dibudpar		Tersosialisasikannya pembangunan bidang kepariwisataan Kabupaten Solok			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					
	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM	2 Orang	30,000,000	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM	2 Orang	30,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					

	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar		Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku	5 Laporan	3,000,000	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar		Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku	5 Laporan	3,000,000	
2	URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN				840,000,000	URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN				840,000,000	
	Program Pengembangan Nilai Budaya				580,000,000	Program Pengembangan Nilai Budaya					
	- Penguatan kelembagaan adat nagari		Jumlah Nagari yang terbina kelembagaan adatnya	74 Nagari (LKAAM & Bundo Kanduang	250,000,000	- Penguatan kelembagaan adat nagari		Jumlah Nagari yang terbina kelembagaan adatnya	74 Nagari (LKAAM & Bundo Kanduang	250,000,000	
			Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan adat yang representatif	10 Unit	130,000,000			Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan adat yang representatif	10 Unit	130,000,000	
			Jumlah pelaksanaan forum dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tingkat Kabupaten Solok	3 Kali	50,000,000			Jumlah pelaksanaan forum dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau tingkat Kabupaten Solok	3 Kali	50,000,000	
			Regulasi pengembalian nama dan simbol-simbol nagari sesuai dengan bentuk/bahasa aslinya	1 Perda	50,000,000			Regulasi pengembalian nama dan simbol-simbol nagari sesuai dengan bentuk/bahasa aslinya	1 Perda	50,000,000	
			Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen sejarah Nagari	11 Nagari	30,000,000			Jumlah Nagari yang mempunyai dokumen sejarah Nagari	11 Nagari	30,000,000	
	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kemitraan pariwisata		Jumlah kelompok sadar wisata	10 Kelompok	70,000,000	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kemitraan pariwisata		Jumlah kelompok sadar wisata	10 Kelompok	70,000,000	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				150,000,000	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					

	- Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		Jumlah festival dan pagelaran budaya	4 festival (pekan budaya sumbar, HUT Kab. Solok, Festival Kuliner/Lomba masak pengek, Festival malam 17 Agustus	100,000,000	- Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		Jumlah festival dan pagelaran budaya	stival Kulin	100,000,000	
	- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan bersejarah, keurbakalaan, museum dan peninggalan bawah air		Cakupan pemeliharaan benda, situs, budaya dan bersejarah, Jumlah tambo Nagari dan Sejarah Nagari	35% (13 BCB)	50,000,000						
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				110,000,000	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				110,000,000	
	- Pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6 Group Kesenian KSPD	40,000,000	- Pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6 Group Kesenian KSPD	40,000,000	
	- Fasilitas penyelenggaraan Uda-uni			5 kali	70,000,000	- Fasilitas penyelenggaraan Uda-uni			5 kali	70,000,000	
3	URUSAN PILIHAN PARIWISATA				1,330,454,000	URUSAN PILIHAN PARIWISATA				1,330,454,000	
	Progam Pengembangan Pemasaran Pariwisata				760,000,000	Progam Pengembangan Pemasaran Pariwisata				760,000,000	
	- Fasilitas pelaksanaan Tour de Singkarak		Jumlah kunjungan wisatawan	5 kali	640,000,000	- Fasilitas pelaksanaan Tour de Singkarak		Jumlah kunjungan wisatawan	5 kali	640,000,000	
	- Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri		Promosi, informasi dan publikasi pariwisata Kab. Solok sesuai dengan Ripparda	5 Tahun	120,000,000	- Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri		Promosi, informasi dan publikasi pariwisata Kab. Solok sesuai dengan Ripparda	5 Tahun	120,000,000	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				175,454,000	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				175,454,000	

	- Fasilitas pelaksanaan wisata minat khusus		Pelaksanaan even diluar pagelaran seni budaya	5 Tahun	30,000,000	- Fasilitas pelaksanaan wisata minat khusus		Pelaksanaan even diluar pagelaran seni budaya	5 Tahun	30,000,000	
	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		- Inventarisasi dan penetapan status lahan & status pengelolaan objek wisata	1,685,076	145,454,000	- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		- Inventarisasi dan penetapan status lahan & status pengelolaan objek wisata	1,685,076	145,454,000	
			- Fasilitas & pengembangan sarana prasarana pendukung Nagari Wisata								
			- Peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung								
	Progam Pengembangan Kemitraan				30,000,000	Progam Pengembangan Kemitraan				30,000,000	
	- Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata		Dokumen MOU		30,000,000	- Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata		Dokumen MOU		30,000,000	
	Program Pengolaan Ruang Terbuka Hijau				365,000,000	Program Pengolaan Ruang Terbuka Hijau				365,000,000	
	- Penataan ruang terbuka hijau		Terlaksananya pemeliharaan dan penataan RTH dan taman			- Penataan ruang terbuka hijau		Terlaksananya pemeliharaan dan penataan RTH dan taman			
	- Pemeliharaan ruang terbuka hijau			12 Lokasi	365,000,000	- Pemeliharaan ruang terbuka hijau			12 Lokasi	365,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016
Kabupaten Solok

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI

Berdasarkan kondisi masyarakat dan modal dasar Kabupaten Solok saat ini, serta tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, maka Visi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025 adalah *“KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK”* dengan komitmen masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, bertaqwa, berakhlak, berbudi luhur dan berdisiplin, dan masyarakat perantau bangga pada kampung halamannya serta aparatur bangga dalam pengabdianya.

Visi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025 tersebut harus dapat diukur dengan menciptakan kehidupan perekonomian masyarakat yang lebih baik, penataan masyarakat Kabupaten Solok yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang ideal serta bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik.

Ditinjau dari tingkat perkembangan kehidupan ekonomi, kemajuan suatu daerah dapat diukur dari tingkat kemakmuran masyarakat yang tercermin dari tingkat pendapatan dan distribusi tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan pembangunan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembangnya keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan

terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktifitas yang makin tinggi.

Kemajuan suatu daerah juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial masyarakat. Sikap dan mental masyarakat yang baik adalah cerminan budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap ini harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Di Kabupaten Solok masyarakat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasipembangunan sehingga seluruh komponen masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari masyarakat,, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu masalah keikutsertaan masyarakat merupakan ciri yang menonjol pula dalam daerah.

Semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya. Dengan

Dalam demikian, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender, dan antar nagari. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus didukung oleh sistem, kelembagaan dan aparatur yang baik. Untuk mencapai pembangunan daerah yang akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sistem harus berjalan dengan efisien dan efektif. Lembaga-lembaga pemerintah daerah merupakan pengejawantahan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu apartur pemerintah yang profesional dengan dedikasi yang tinggi merupakan modal dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Daerah yang maju ditandai oleh peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta

dalam kehidupan politik. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang masyarakatnya sadar akan hak dan kewajibannya sesuai sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sangat disiplin dan menghargai hak orang lain disamping mengetahui hak dan kewajibannya sendiri. Demokratisasi sudah berjalan sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Artinya daerah yang maju adalah daerah yang warga masyarakatnya terjamin hak haknya, yang terjamin rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupannya.

Kemajuan suatu daerah tercermin antara lain pada kemampun untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung aktifitas perekonomian masyarakat. Pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari kemampuan sendiri menjadi tolak ukur dalam peningkatan perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur yang mengedepankan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup juga menjadi ciri suatu daerah yang maju. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya yang sangat sulit untuk diperbaharui memerlukan strategi dan antisipasi dini agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daiam jangka waktu yang lama.

3.2 Misi

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

3.2.1. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang mandiri serta didorong oleh pemerintah daerah adalah memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan dan potensi masingmasing Nagari menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan ditingkat lokal. Produktifitas yang tinggi didukung oleh kualitas dan pemasaran yang berkelanjutan akan memacu gairah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

3.2.1. Mewujudkan Penataan Masyarakat yang Mampu Menyelaraskan Kehidupannya dengan arus modernisasi dan globalisasi adalah meningkatkan pembangunan pelayanan hak-hak dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan nagari yang masih tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

3.2.3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Antisipatif, Fasilitatif, Profesional dan Proposional, Tranparansi dan Akuntabel adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah sesuai dengan b'kian'g tugasnya, penataan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan yang mengedepankan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan proporsi masing-masing sektor pembangunan, Meningkatkan kepatuhan aparat dan masyarakat terhadap hukum serta memelihara kerukunan dan ketertiban bermasyarakat.

3.2.4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana adalah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktifitas perekonomian, pembangunan infrastruktur pubbbk dan infrastruktur sosial dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.3. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Solok

Arah pembangunan Daerah Kabupaten Solok merupakan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Solok sebagai Kabupaten Yang Terbaik dari yang baik sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang ada dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Solok menjadi Kabupaten terbaik dari yang baik, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan kepada sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

3.3.1. Terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang mandiri serta didorong oleh pemerintah daerah, yang ditunjukkan oleh

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai Rp. 12.747.390,-
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh bedandaskan keunggulan komparatif diberbagai nagari Kabupaten Solok. Sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri kecil, usaha kecil, mikro dan menengah serta pertambangan menjadi basis aktifitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang bersaing global industri pariwisata menjadi motor penggerak perekonomian serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan bermutu dan berdaya saing.
3. Tercapainya pertumbuhan investasi yang mampu mendukung tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan berbagai lapangan kerja dan usaha serta menurunnya tingkat pengangguran.

Terwujudnya Penataan masyarakat yang Mampu Menyeleraskan Kehidupan dengan arus modernisasi dan globalisasi, yang ditunjukkan oleh:

1. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga
2. Tercapainya kualitas sumber daya manusia yang sernakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 6,9 % dan jumlah penyandang masalah sosial

4. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
5. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Kabupaten Solok dan memperkuat jati diri dan kepribadian sebagai orang minang.

Terwujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Antisipatif, Fasilitatif, Profesional dan Proposional, Tranparansi dan Akuntabel, yang ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, santun dan tegas, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung pembangunan daerah.
2. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta tertatanya sistem hukum adat yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
3. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang selalu bersendikan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri serta adanya kemandirian daerah.

Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang ditunjukkan oleh :

1. Tercapainya pembangunan yang semakin merata keseluruhan nagari. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat diseluruh nagari, termasuk berkurangnya kesenjangan antar nagari dan kecamatan.
2. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi nagari dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang

efisien dan moderen guna terciptanya masyarakat informasi Kabupaten Solok.

3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel serta terwujudnya Daerah tanpa permukiman kumuh.
4. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
5. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah.
6. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 2018 adalah:

1. Tersedianya acuan pelaksanaan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2018 dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
2. Sebagai pedoman untuk menentukan skala prioritas pembangunan Sektor Kepariwisata dan Kebudayaan.
3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Program Pembangunan dan pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan.
4. Sebagai pedoman evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan dan pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan untuk tahun 2016-2020.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan program kerja kepariwisataan dan kebudayaan untuk mendukung program kerja kepala daerah selama 1 (satu) tahun.

3.5 Program dan Kegiatan

a. Visi dan Misi SKPD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan serta dalam rangka mendukung tercapainya visi Kabupaten Solok maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kabupaten Solok menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya pesona wisata dan budaya Kabupaten Solok yang bersinergi dan berkelanjutan “

Dalam usaha tercapainya visi tersebut diatas, Dinas sebagai berikut:

1. *Mewujudkan pembangunan infrastruktur keparawisataan dengan fokus pada tiga kawasan (danau singkarak dan sekitarnya, THKT, dan danau kembar sekitarnya.*
2. *Meningkatnya seni dan budaya yang bernuansa ABS-SBK.*
3. *Menngkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi, pemasaran dan industri pariwisata daerah*
4. *Meningkatkan kemitraan dengan lembaga dan stake holder terkait bidang pariwisata*
5. *Membangun kepariwisataan melalui kerjasama lintas SKPD dan pelaku pariwisata.*

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam menjabarkan program pokok yang tercantum pada RPJMD 2011-2016 maka perlu ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang mendukungnya serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka ditetapkan program dan kegiatan untuk urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata Tahun 2018 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan SKPD					Pagu Indikatif (Rp)
Sasaran		Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja	
4	Terwujudnya eksistensi kesenian dan budaya nagari untuk mengangkat tradisi dalam pewarisan nilai-nilai budaya daerah	IV.	Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Buku sejarah dan tambo nagari, jumlah database nagari, kelembagaan adat yang terbina	
		1.	Pelestarian adat dan budaya daerah		
Program dan Kegiatan SKPD					Pagu Indikatif (Rp)
Sasaran		Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja	

1	Meningkatnya a efektifitas promosi dan kerjasama kepariwisata an	I.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi wisata melalui media cetak, elektronik, pameran, leaflet, dan booklet serta adanya duta wisata yang dipilih setiap tahunnya	
		1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Tour de Singkarak		1.199.100.000,-
		2.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran		

Program dan Kegiatan SKPD					Pagu Indikatif (Rp)
Sasaran		Program Dan Kegiatan		Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya a efektifitas promosi dan kerjasama kepariwisata an	I.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi wisata melalui media cetak, elektronik, pameran, leaflet, dan booklet serta adanya duta wisata yang dipilih setiap tahunnya	
		1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Tour de Singkarak		,-
		2.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran		
		3.	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata		

		4.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri		
		5.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan duta wisata (Uda Uni)		
		6.	Fasilitasi Wisata Minat Khusus		
2	Meningkatnya daya dukung masyarakat terutama generasi muda untuk sadar wisata	II.	Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok generasi muda dan stakeholder sadar wisata yang terbentuk	
		1.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata		
		2.	Fasilitasi pembentukan forum antar pelaku industri pariwisata dan budaya		
3	Meningkatnya kualitas Penataan objek wisata di kawasan wisata unggulan Kabupaten Solok	III.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana objek wisata dan dunia usaha wisata	
		1.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata		
		2.	Pengembangan objek wisata unggulan		
		3.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata		
		4.	Pengembangan, sosialisasi dan Penerapan serta pengawasan standarisasi		
		5.	Fasilitasi pelaksanaan wisata minat khusus		
4	Terwujudnya eksistensi kesenian dan budaya nagari untuk mengangkat tradisi dalam pewarisan	IV.	Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Buku sejarah dan tambo nagari, jumlah database nagari, kelembagaan adat yang terbina	
		1.	Pelestarian adat dan budaya daerah		
		2.	Penguatan Kelembagaan Adat Nagari		

	nilai-nilai budaya daerah	3.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana		
		4.	kelembagaan adat Faktualisasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		
		5.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah kelompok sadar wisata	
		6.	Pelestarian aktualisasi adat budaya	Pengadaan pakaian/alat-alat kesenian	
		V.	Peningkatan pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Grup-grup seni budaya, Jumlah festival yang diikuti	
		1.	Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah		
		2.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya		
		3.	Fasilitasi penyelenggaraan Uda-Uni		
		VI	Pengelolaan kekayaan budaya	Terlaksananya 4 festival (pekan budaya Sumbar, Hut Kab. Solok, Lomba Masak dan festival malam 17 Agustus dan seni budaya anak nagari)	
		1.	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		
		2.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan bersejarah, kepurbakalaan museum.	Benda Cagar Budaya	
5	Meningkatnya lokasi ruang terbuka hijau yang	VII .	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi taman wisata yang terpelihara	
		1.	Penataan Ruang Terbuka hijau		

	terpelihara sebagai salah satu kunjungan wisatawan				
--	--	--	--	--	--

Tabel 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Solok

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2018				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	NON URUSAN						
1	17	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		APBD	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan pelayanan asa surat menyurat		100%	3.000.000	APBD	
	- Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik			100%	150.000.000	APBD	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional				17.000.000	APBD	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor				1.200.000	APBD	
	- Penyediaan alat tulis kantor				60.000.000	APBD	
	- Penyediaa barang cetak dan penggandaan				40.000.000	APBD	
	- Penyediaan komponen intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				10.000.000	APBD	
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				100.000.000	APBD	
	- Peyediaan makan dan minum kantor				45.000.000	APBD	
	- Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah				90.000.000	APBD	
	- Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah				65.000.000	APBD	
	- Honorarium pegawai tidak tetap				432.000.000	APBD	

[illegible]

					URUSAN PILIHAN PARIWISATA									
2	4	1	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					1.960.000.000	APBD			
				01	Aanalisisa pasar untuk promosi pariwisata dan pemasaran objek wisata									
						- Terkumpulnya data dan fakta yang berhubungan dengan analisa pasar pariwisata		3 kawasan		275.000.000	APBD			
						- Terlaksananya stusi banding tentang analisa pariwisata		1 kali studi banding		50.000.000	APBD			
						- Tersusunya SOP / buku tentang analisa pasar pariwisata		1 tahun		75.000.000	APBD			
				02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata									
						- Tersedianya pusat informasi kepariwisataan ditempat destinasi unggulan	3 kawasan danau dan TWHK			750.000.000				
						- Tersediannya fre wifi di lokasi objek wisata unggulan	3 kawasan danau dan TWHK			75.000.000				
						- Tersedianya travel information centre		3 paket		180.000.000				
						- website maintanance	1 tahun			50.000.000				
						- Tersedianya video ttg promosi pariwisata	1 tahun			175.000.000				
						- adanya radio online untuk mempromaikan pariwisata	1 tahun			100.000.000				
				03	Pengenbangan jaringan kerjasanma promosi pariwisata	- Terbangunnya kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata, melakukan tahapan - tahapan pengelolaan 3 destinasi pariwisata kepada pihak ketiga dengan cara KSP maupun BSG		1 tahun		150.000.000				

							5. Festival Band			500.000.000							
							6. Pelaksanaan Tds			610.000.000							
							7. Lomba dayung			200.000.000							
							8. Lomba burung kicau			50.000.000							
							9. Lomba kuliner			50.000.000							
							10. lomba foto wisata/journal			75.000.000				wisata			
							11. buru babi			45.000.000							
							12. buru kijang			55.000.000							
							13. pendakian gn talang			30.000.000							
							14. off road ekspedition			100.000.000							
							15. Trabas adventure			75.000.000							
							16. fun bike di objek wisata	n		30.000.000							
							17. Lomba lagu minang			35.000.000							
							18. lomba randai			45.000.000							
							19. Festival rabana			30.000.000							
							20. lomba pidato adat			40.000.000							
2	4	1	16				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
					01		Pengembangan objek pariwisata unggulan	1. Tersusunnya dokumen master plan dan DED kawasan danau singkarak dan sekitarnya		2 dokumen	650.000.000	APBD					
								2. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)		2 paket TWHK Arosuka dan sernaga sigkarak	3.000.000.000	(DAK)					
								3. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata		1 paket (kawasan THKW)	1.500.000.000	Burdon sharing Prov					
								4. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata		3 KSPD	1.000.000.000	APBD					
								5. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata		2 paket (kawasan THKW dan objek wisata batu galeh sulit air)	11.250.000.000	APBD					

BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Tahun dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomr 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Solok dan Renstra Dinas).

Renja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Tahun 2018, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Serta dapat memberikan pedoman dan arahan bagi stakeholder terkait untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan.

Lebih dari itu dengan adanya renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok yaitu ***“Terwujudnya pesona wisata dan budaya Kabupaten Solok yang bersinergi dan berkelanjutan”***.

Perwujudan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Arosuka, Februari 2017

DNAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kepala,

YANDRA, SE,M.Si
NIP. 19660101 198603 1 011